BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan guna mendukung implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu diganti dan disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969)
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 240);
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas adalah Satuan Perangkat Kerja Kabupaten yang menyelenggarakan urusan bidang kearsipan.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
8. Arsip Dinamis adalah adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan setelah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
10. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
12. Fungsi fasilitatif adalah merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
13. Fungsi substantif adalah merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Ay.

14. Kode adalah tanda pengganti masalah seperti yang tercantum dalam klasifikasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis;
b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan Pemerintah Kabupaten dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; dan
d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

BAB II
PENGGUNAAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

(1) Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kode Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
    a. fungsi fasilitatif; dan
    b. fungsi substantif.
(3) Pencipta Arsip bertanggung jawab menetapkan klasifikasi arsip berdasarkan pedoman penyusunan kode klasifikasi arsip.
(4) Penyusunan Kode Klasifikasi Arsip di pencipta arsip dilaksanakan oleh unit kearsipan.
(5) Untuk membantu pelaksanaan penyusunan kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk tim penyusun kode klasifikasi arsip.
(6) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
(7) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.
(8) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Juli 2024 M
25 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Juli 2024 M
25 Dzulhijjah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

DAYAN ALBAR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

000 UMUM
- 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
  - 000.1.1 Telekomunikasi
  - 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
    - 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
    - 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
    - 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
  - 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
    - 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
    - 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
    - 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
  - 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
  - 000.1.5 Rapat Pimpinan antara lain: notula/risalah rapat
  - 000.1.6 Penyediaan Konsumsi
  - 000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
    - 000.1.7.1 Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Dinas
    - 000.1.7.2 Pemeliharaan dan Perbaikan
    - 000.1.7.3 Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan
  - 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
    - 000.1.8.1 Pertamanan/*Landscape*
    - 000.1.8.2 Penghijauan
    - 000.1.8.3 Perbaikan Gedung
    - 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
    - 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/Wisma
    - 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
  - 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
    - 000.1.9.1 Perbaikan/Pemeliharaan
    - 000.1.9.2 Pemasangan
  - 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
    - 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas

Df.

000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan

000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir

000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satuan Pengamanan (Satpam), Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

000.2 PERLENGKAPAN

000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan

000.2.1.1 Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan

000.2.1.2 Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan

000.2.2 Pemeliharaan Peralatan Kantor

000.2.2.1 Data Hasil Pemeliharaan Kantor

000.2.2.2 Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor

000.2.3 Distribusi

000.2.3.1 Barang Habis Pakai

000.2.3.2 Barang Milik Daerah

000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: keputusan pembentukan tim, berita acara penghapusan barang milik daerah, daftar barang yang dihapuskan, laporan hasil pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) termasuk di dalamnya proses lelang penghapusan

000.2.5 Pengelolaan *Database* Barang Milik Daerah

000.3 PENGADAAN

000.3.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)

000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)

000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain: *database* pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, *database* kontrak, *database* pengadaan barang/jasa

000.3.6 *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan antara lain: laporan hasil *monitoring*, laporan hasil evaluasi

000.4 PERPUSTAKAAN

000.4.1 Kebijakan di Bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.4.2 Deposit Bahan Pustaka

000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman

000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional

000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog

000.4.3 Koleksi Pustaka

000.4.3.1 Pembelian

000.4.3.2 Hibah

000.4.3.3 Hadiah

000.4.3.4 Tukar Menukar

000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)

000.4.3.6 Terbitan Internal

000.4.3.7 Pendistribusian Bahan Pustaka surplus

000.4.3.8 Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)

000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka

000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi

000.4.6 Layanan Perpustakaan

000.4.6.1 Keanggotaan

000.4.6.2 Peminjaman

000.4.6.3 Pengembangan Gemar Baca

000.4.7 Kerja Sama Perpustakaan

000.4.7.1 *Memorandum of Understanding* (MoU)

000.4.7.2 Perjanjian Kerja Sama

000.4.7.3 Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerja Sama Internasional

000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan

000.4.8.1 Pengembangan Situs *Web*

000.4.8.2 Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia

000.4.8.3 Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan

DA.

000.4.8.4 Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital
000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
000.4.10 Konservasi
000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
000.4.12 Transformasi Digital
000.4.13 Kurasi Digital
000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
000.4.14.1 Perpustakaan Umum
000.4.14.2 Perpustakaan Khusus
000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

000.5 KEARSIPAN
000.5.1 Kebijakan di Bidang Kearsipan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.5.2 Pembinaan Kearsipan
000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: formasi jabatan arsiparis, analisis kebutuhan arsiparis
000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
000.5.2.3 Penilaian Arsiparis
000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: berkas penyelenggaraan pemilihan arsiparis teladan, berkas penetapan arsiparis teladan
000.5.2.5 *Database* Arsiparis
000.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan
000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi, antara lain: perencanaan supervisi dan evaluasi, pelaksanaan supervisi dan evaluasi, laporan hasil supervisi dan evaluasi
000.5.2.8 *Database* Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain: fasilitasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan, fasilitasi prasarana dan sarana kearsipan
000.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: berkas penyelenggaraan pemilihan lembaga/unit kearsipan, berkas penetapan lembaga/unit kearsipan teladan

D f.

000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip (JRA), antara lain: berkas usulan persetujuan JRA, surat persetujuan JRA dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis

000.5.3.1 Penciptaan (antara lain: buku registrasi naskah masuk dan keluar, buku agenda, kartu kendali, lembar pengantar/buku ekspedisi)

000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)

000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)

000.5.3.4 Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)

000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)

000.5.4 Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)

000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

000.5.6 Penyusutan Arsip

000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)

000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: Surat Keputusan (SK) Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk pemusnahan arsip

dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 tahun, Penetapan Arsip yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip yang Dimusnahkan.

000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: pembentukan panitia penilai, notulen rapat panitia, surat pertimbangan panitia penilai, surat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan, surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, keputusan penetapan penyerahan, berita acara penyerahan arsip, daftar arsip yang diserahkan)

000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: kebijakan alih media, autentikasi, berita acara, daftar arsip yang dialihmediakan)

000.5.8 *Database* Pengelolaan Arsip Dinamis

000.5.8.1 *Database* Pengelolaan Arsip Aktif

000.5.8.2 *Database* Pengelolaan Arsip Inaktif

000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis

000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: *monitoring* fisik dan daftar, verifikasi terhadap daftar arsip, menetapkan status arsip statis, persetujuan untuk penyerahan, penetapan arsip yang diserahkan, berita acara penyerahan, daftar arsip yang diserahkan

000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan

000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: administrasi kegiatan, berita acara wawancara sejarah lisan, laporan kegiatan, hasil wawancara (kaset/ *Compact Disc* (CD)/ media lain sesuai perkembangan teknologi informasi, dan transkrip)

000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman,

D 4.

akuisisi daftar pencarian arsip statis)

000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, *guide*)

000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)

000.5.9.7 Preservasi Kuratif

000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)

000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: layanan arsip, penerbitan naskah sumber)

000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)

000.5.11 Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

000.5.12 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana

000.5.13 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Digabung dan/atau Dibubarkan

000.5.14 Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

000.5.15 Pengawasan Kearsipan

000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal

000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal

000.5.15.3 Sanksi

000.6 PERSANDIAN

000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.6.2 Pengamanan persandian

000.6.2.1 Pengamanan Sinyal: teknik sandi dan kripto

000.6.2.2 Analisis Sinyal: teknik sandi dan kripto

000.6.2.3 Materiil Sandi: sistem dan peralatan

000.6.3 Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi

000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian

000.6.3.2 Administrasi Pengkajian

000.6.3.3 Pelaksanaan

000.6.3.4 Pelaporan

000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian

Dd.

000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
000.6.4.2 Jaring Komunikasi

000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
000.6.5.4 Penyesuain Sistem dan *Testing*
000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
000.6.5.7 Pelaporan

000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang
000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
000.7.1.2 Musrenbang Nasional
000.7.1.3 Musrenbang Kabupaten/Kota
000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
000.7.1.6 Musrenbang Desa

000.7.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
000.7.2.6 Program Kerja Tahunan
000.7.2.7 Penetapan/Kontrak Kinerja
000.7.2.8 Laporan Berkala
000.7.2.9 Laporan *Insidential*
000.7.2.10 Evaluasi Program

000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan

000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

000.7.6 Aksi Strategis Daerah
000.7.6.1 Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategi Daerah
000.7.6.2 Rapat Pembahasan Rancangan Awal dengan Perangkat Daerah
000.7.6.3 Sosialisasi Dengan Perangkat Daerah
000.7.6.4 Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategi Daerah

000.7.6.5 Penerapan perencanaan aksi strategi daerah

000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan

000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah

000.7.7.2 Pendanaan Daerah

000.7.7.3 Kerja Sama Pembangunan Nasional

000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara

000.7.7.5 Pendanaan *On Top* atau Inisiatif Baru

000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

000.8.1.1 Pembentukan

000.8.1.2 Pengubahan

000.8.1.3 Pembubaran

000.8.2 Uraian Jabatan

000.8.2.1 Analisa Jabatan

000.8.2.2 Analisa Beban Kerja

000.8.3 Ketatalaksanaan

000.8.3.1 Proses Bisnis

000.8.3.2 Standar Pelayanan

000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur

000.8.3.4 Pelayanan Publik

000.8.4 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional

000.8.5 Evaluasi Kelembagaan

000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi

000.8.6.1 Budaya Kerja

000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

000.9.1 Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.9.2 Penelitian, Pengkajian, Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi

000.9.3 Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian Dan Pengembangan

000.9.4 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

000.9.5 Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

000.9.6 Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 000.9.6.1 Data
- 000.9.6.2 Statistik
- 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/ Pengkajian

000.9.7 *Master Proceeding*/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

000.9.8 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

000.9.10 Seminar, Lokakarya, Temukarya, *Workshop*

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (fasilitasi, bimbingan, pengawasan, *monitoring* dan evaluasi)

100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (fasilitasi, *monitoring*, dan evaluasi)

100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Hubungan Antarlembaga (fasilitasi, *monitoring*, dan evaluasi)
- 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
- 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
- 100.1.4.4 Hubungan Antarlembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
- 100.1.4.5 Asosiasi Daerah

100.1.5 Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa

100.1.6 Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, *Monitoring*, dan Evaluasi)
- 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah

100.1.7 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)/ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Df.

(LKPJAMJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (fasilitasi, *monitoring* dan evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

100.2.1 Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerja Sama

100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta *Monitoring* dan Evaluasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Serta *Monitoring* dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Serta *Monitoring* dan Evaluasi Kerja Sama Daerah

100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan

100.2.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum

100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan

100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah

100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas antarnegara

100.2.3.3 Batas antardaerah Wilayah

100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah antarkecamatan, Batas Wilayah antarkelurahan Satu Kecamatan dan Batas Wilayah Kelurahan antarkecamatan

100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah

100.3 HUKUM

100.3.1 Program Legislasi

100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah

100.3.1.2 Program Legislasi

100.3.2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan

100.3.3 Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah

100.3.3.1 Keputusan/Ketetapan Gubernur

100.3.3.2 Keputusan/Ketetapan Bupati

100.3.3.3 Keputusan/Ketetapan Walikota

100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi

Df.

	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
	100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
100.3.4	Instruksi/Surat Edaran	
	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
	100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
100.3.5	Surat Perintah	
	100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
	100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	
100.3.7	Nota Kesepakatan/*Memorandum of Understanding* (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	
	100.3.7.1	Dalam Negeri
	100.3.7.2	Luar Negeri
100.3.8	Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan yang dijadikan referensi)	
100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	
100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
100.3.11	Kasus/Sengketa Hukum	
	100.3.11.1	Pidana kasus/sengketa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran
	100.3.11.2	Perdata kasus/sengketa perdata
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara
	100.3.11.4	Perburuhan
	100.3.11.5	*Arbitrase*
	100.3.11.6	Sengketa Adat
100.3.12	Perizinan	
100.3.13	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
	100.3.13.1	Hak Cipta
	100.3.13.2	Hak Paten
	100.3.13.3	Hak Desain Industri
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
	100.3.13.5	Hak Merk
100.3.14	Permohonan HAKI yang ditolak	

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Df.

200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
	200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
	200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
	200.1.2.3	Bela Negara
	200.1.2.4	Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan
	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan antarnegara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
	200.1.4.1	Ketahanan Seni
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
	200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
	200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
	200.1.4.6	Fasilitasi
	200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerja Sama Kegiatan dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/LNL
	200.1.4.9	Evaluasi Aktivitas Ormas: Sanksi Administrasi
	200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
200.1.5	Politik Dalam Negeri	
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Publik
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
	200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang Memperoleh Kursi
	200.1.5.5	Partai Politik yang Tidak Memperoleh Kursi

Df.

200.1.5.6 Pemerintah Daerah
200.1.5.7 *Database* Partai Politik (Parpol)
200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
200.1.5.9 Pemilihan Umum

200.1.6 Ketahanan Ekonomi
200.1.6.1 Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

200.2 PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

200.2.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
200.2.2.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
200.2.3.1 Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Partai Politik
200.2.3.2 Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik
200.2.3.3 Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
200.2.3.4 Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual

200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu
200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
200.2.4.2 Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR
200.2.4.3 Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR
200.2.4.4 Keputusan KPU Tentang Penetapan Daerah Pemilihan

dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

200.2.4.5 Peta Daerah Pemilihan

200.2.5 Pencalonan Pemilu

200.2.5.1 Petunjuk Teknis Pencalonan

200.2.5.2 Surat Pencalonan Pendaftaran

200.2.5.3 Daftar Bakal Calon

200.2.5.4 Dokumen Persyaratan Masing-Masing Bakal Calon

200.2.5.5 Dokumen Verifikasi Administrasi

200.2.5.6 Daftar Calon Sementara Dan Calon Tetap

200.2.6 Kampanye Pemilu

200.2.6.1 Keputusan KPU Tentang Penetapan Jadwal Kampanye

200.2.6.2 Nama Juru Kampanye/ Pelaksana Kampanye

200.2.6.3 Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye

200.2.7 Dana Kampanye

200.2.7.1 Pedoman *Audit* Dana Kampanye

200.2.7.2 Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu

200.2.7.3 Laporan Hasil Audit Dana Kampanye

200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara

200.2.8.1 Keputusan KPU Tentang Desain Dan Spesifikasi Surat Suara

200.2.8.2 *Master* Surat Suara

200.2.8.3 Surat Suara Yang Terpakai

200.2.8.4 Surat Suara Tidak Terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)

200.2.8.5 Formulir Pemilu di Pemerintah Daerah

200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu

200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu

200.2.10.1 Surat-Surat Mengenai Perselisihan Hasil Pemilu

200.2.10.2 Jawaban dan Kesimpulan Termohon

200.2.10.3 Salinan Putusan Lembaga Peradilan

200.2.11 Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

300.1.1 Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang Dilakukan di Pemerintah Daerah

300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja

Dt.

300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja
300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
300.1.3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja
300.1.4 Perlindungan Masyarakat
300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN
300.2.1 Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
300.2.2.1 Rencana dan Standardisasi dan Pengawakan dan Perbekalan
300.2.2.2 Kurikulum dan Silabus, Evaluasi dan *Monitoring*
300.2.2.3 Tenaga Pencarian Pertolongan, Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.2.4 Permasyarakatan Pencarian dan Pertolongan, Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.2.5 Perencanaan dan Standardisasi, Penyelenggaraan Operasi *Search and Rescue* (SAR), Siaga dan Latihan, Tempat Latihan
300.2.2.6 Registrasi BEACON
300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
300.2.5.2 Penyiapan Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
300.2.8 Operasi Komunikasi

Df.

300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
300.2.8.3 Registrasi BEACON
300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
300.2.12 Pelaporan dan Evaluasi
300.2.12.1 Laporan Harian
300.2.12.2 Laporan Bulanan
300.2.12.3 Laporan Tahunan
300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
400.1.1 Kebijakan di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan Keterampilan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.3 Fasilitasi Sumber Daya Hayati dan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, Energi dan Lingkungan hidup
400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan Inovasi
400.1.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.7 Pemantauan dan Evaluasi
400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.2 Fasilitasi informasi dan telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.5 Fasilitasi Energi dalam Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.7 Pemantauan dan Evaluasi
400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha

Df.

	400.1.4.1	Fasilitasi Investasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan Ekonomi dan Dunia Usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan Usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan Evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal
	400.1.4.10	*Monitoring* dan Evaluasi Ekonomi Desa Tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal
	400.1.4.13	*Monitoring* dan evaluasi masyarakat tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa
400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
	400.1.5.1	Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal
	400.1.5.2	Penguatan Organisasi Masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan Masyarakat
	400.1.5.4	Kerja Sama Antarlembaga Sosial dan Budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan Evaluasi
400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
	400.1.6.1	Fasilitasi Pengembangan Daerah Perbatasan
	400.1.6.2	Fasilitasi Pengembangan Daerah Rawan Konflik dan Bencana
	400.1.6.3	Fasilitasi Pengembangan Daerah Perdesaan
	400.1.6.4	Fasilitasi Pengembangan Daerah Pulau Terpencil dan Terluar

DA.

400.1.6.5 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis
400.1.6.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Khusus
400.1.6.7 Pemantauan dan Evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

400.2.1 Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.2.2 Pengarusutamaan Gender, Ekonomi, Politik, Sosial dan Hukum
400.2.2.1 Data Gender
400.2.2.2 Advokasi dan Fasilitasi

400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
400.2.3.2 Data Perlindungan Perempuan
400.2.3.3 Advokasi dan Fasilitasi
400.2.3.4 *Monitoring*, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan
400.2.3.5 Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender
400.2.3.6 Analisis dan Penyajian Informasi Gender
400.2.3.7 Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Ibu

400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum)
400.2.4.1 Pencegahan kekerasan terhadap anak
400.2.4.2 Data perlindungan anak
400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
400.2.4.4 *Monitoring*, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak

400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
400.2.5.3 Data Tumbuh Kembang Anak
400.2.5.4 Advokasi dan Fasilitasi

400.2.5.5 *Monitoring*, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak
400.2.5.6 Penyelenggaraan *Parenting* Pola Pengasuhan Anak
400.2.6 Penghargaan Terkait Gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak
400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN
400.3.1 Kebijakan di Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
400.3.2.1 Bahan Ajar (alat permainan edukatif)
400.3.2.2 Pelatihan Sosial
400.3.2.3 Peringatan Hari Anak
400.3.2.4 *Block Grant*
400.3.3 Pendidikan Masyarakat
400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
400.3.3.2 Penilaian dan Pemberian Bantuan Sosial
400.3.3.3 Pembinaan Program
400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan
400.3.3.5 Pameran
400.3.3.6 Rapat Koordinasi (Rakor)
400.3.3.7 Sosialisasi
400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
400.3.5.1 Kurikulum, Bahan Ajar
400.3.5.2 *Block Grant*
400.3.5.3 Pelatihan, Bimbingan Teknis (Bimtek), Sosialisasi,
400.3.5.4 Lomba, Penghargaan, Penganugerahan
400.3.5.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin
400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus
400.3.6.2 Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran
400.3.6.2 *Block Grant*
400.3.6.3 Lomba, Festival
400.3.6.4 Sosialisasi, Bimtek
400.3.6.5 Pendataan
400.3.6.6 Kelembagaan
400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.7.1 Pendataan dan Pemetaan

	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan Kesejahteraan Guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, Bimtek
	400.3.7.7	*Block Gant*
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	*Block Grant*
	400.3.8.5	Bimbingan Teknis/Sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba, Sayembara, Festival
	400.3.8.7	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan Siswa Miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan Ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	*Block Gant*
	400.3.9.4	Sosialisasi, Bimtek
	400.3.9.5	Lomba, Sayembara, Jambore, Festival
	400.3.9.6	Kurikulum/Bahan Pembelajaran
	400.3.9.7	Alat Bantu Pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (unit kesehatan sekolah, pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.10.3	Sertifikasi Guru
	400.3.10.4	Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah
	400.3.10.5	Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	400.3.10.6	Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik
	400.3.10.7	*Block Grant*
	400.3.10.8	Bimbingan Teknis/Sosialisasi
400.3.11	Penilaian Pendidikan	
	400.3.11	Penilaian Akademik
	400.3.12	Penilaian Nonakademik
	400.3.13	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
	400.3.12.1	Data Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dy.

400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran

400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan

400.3.13.1 Prasarana Pendidikan

400.3.13.2 Sarana Pendidikan

400.3.13.3 *Monitoring* dan Evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN

400.4.1 Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan

400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah

400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi

400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal

400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi

400.4.3.1 Olahraga Massal

400.4.3.2 Olahraga Tradisional

400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata

400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga

400.4.4.1 Olahraga Pendidikan

400.4.4.2 Olahraga Rekreasi

400.4.4.3 Olahraga Prestasi

400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga

400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus

400.4.5.1 Olahraga Tradisional

400.4.5.2 Layanan Khusus

400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan

400.4.6.2 Penghargaan Olahraga

400.4.7 Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Olahraga

400.4.7.1 Pembibitan Olahraga

400.4.7.2 Kompetisi

400.4.7.3 IPTEK Olahraga

400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan

400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan

400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga

400.4.9.1 Industri Olahraga

400.4.9.2 Promosi Olahraga

400.4.10 Olahraga Prestasi

400.4.10.1 Daerah

400.4.10.2 Nasional

400.4.10.3 Internasional

400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga

400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan

400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga

400.5 KEPEMUDAAN
400.5.1 Kebijakan di Bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
400.5.2.1 Penelusuran (duta kepemudaan)
400.5.2.2 Pengkajian (rekomendasi kepemudaan melalui forum kepemudaan)
400.5.2.3 Pengembangan
400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
400.5.4.2 Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan)
400.5.5.1 Pengkajian
400.5.5.2 Pengembangan
400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)
400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
400.5.6.1 Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan, Pengembangan, Kepedulian, Pendampingan
400.5.7 Kewirausahaan
400.5.7.1 Kelembagaan
400.5.7.2 Pengaderan
400.5.7.3 Perintisan
400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumber Daya
400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumber Daya
400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumber Daya

400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumber Daya

400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

400.5.9.1 Standardisasi

400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda

400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda

400.5.10.1 Kemitraan

400.5.10.2 Penghargaan Pemuda

400.6 KEBUDAYAAN

400.6.1 Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

400.6.2.1 Registrasi Nasional

400.6.2.2 Perlindungan

400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan

400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi

400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman

400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan

400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa

400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film

400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi

400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya

400.6.4.1 Sejarah

400.6.4.2 Pemetaan Nilai

400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai

400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi

400.6.4.5 Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah

400.6.4.6 Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah

400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya

400.6.5.1 Internalisasi Nilai Budaya

400.6.5.2 Kekayaan Budaya

400.6.5.3 Warisan Budaya Nasional dan Dunia

400.6.5.4 Diplomasi Budaya

400.7 KESEHATAN

400.7.1 Kebijakan di Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar

400.7.2.1 Pelayanan Kedokteran Keluarga

400.7.2.2 Praktek Klinis Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer

400.7.2.3 Pelaksanaan Kesehatan Primer

400.7.2.4 Kesehatan Gigi dan Mulut di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

400.7.2.5 Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit

Df.

400.7.2.6 *International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem Tenth Revisions (ICD 10), Destistry & Stomatology*
400.7.2.7 Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
400.7.2.8 Penyakit Mulut Di Tingkat Primer
400.7.2.9 Pembiayaan Darah
400.7.2.10 Penggunaan Darah Rasional
400.7.2.11 Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah
400.7.2.12 Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil dan Kepulauan
400.7.2.13 Akreditasi Puskesmas
400.7.2.14 Puskesmas Berprestasi

400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
400.7.3.1 Pelayanan Kesehatan Rujukan
400.7.3.2 Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)
400.7.3.3 Pelayanan Rumah Sakit Privat
400.7.3.4 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
400.7.3.5 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan
400.7.3.6 Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan
400.7.3.7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing Dan Perdagangan Jasa
400.7.3.8 Badan Pengawas Rumah Sakit
400.7.3.9 Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
400.7.3.10 Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya

400.7.4 Keperawatan dan Keteknisian Medik
400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar
400.7.4.2 Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit
400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
400.7.4.5 Bina Pelayanan Kebidanan

400.7.5 Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
400.7.5.1 *Mikrobiologi* dan *Imunologi*
400.7.5.2 *Patologi* dan *Toksilogi*

Dd.

	400.7.5.3	*Radiologi*
	400.7.5.4	Perizinan dan Sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan Prasarana Kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan Jiwa di Nonfasilitas Pelayanan Kesehatan
	400.7.6.2	Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	400.7.6.3	*Etikolegal* dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Sejenisnya
	400.7.6.5	*Etikolegal* dan Asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan Jiwa Kelompok Beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina Kesehatan dan Kesehatan di Pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan Matra
400.7.8	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian *Tuberkulosis*
	400.7.8.2	Pengendalian *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* dan Penyakit Menular Seksual
	400.7.8.3	Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut
	400.7.8.4	Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian Kusta dan Frambusia
400.7.9	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	
	400.7.9.1	Pengendalian Malaria
	400.7.9.2	Pengendalian *Arbovirosis*
	400.7.9.3	Pengendalian *Zoonosis*
	400.7.9.4	Pengendalian *Filariasis* dan Kecacingan
400.7.10	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
	400.7.10.1	Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
	400.7.10.2	Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik
	400.7.10.3	Penyakit Kanker
	400.7.10.4	Penyakit Kronis dan Generatif

400.7.10.5 Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan

400.7.11 Penyehatan Lingkungan

400.7.11.1 Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar

400.7.11.2 Pemukiman dan Tempat Umum

400.7.11.3 Kawasan dan Sanitasi Darurat

400.7.11.4 Higien Sanitasi Pangan

400.7.11.5 Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi

400.7.12 Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan

400.7.13 Gizi

400.7.13.1 Gizi Makro

400.7.13.2 Gizi Mikro

400.7.13.3 Gizi Klinik dan Diatetik

400.7.13.4 Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan

400.7.13.5 Kewaspadaan Gizi

400.7.14 Kesehatan Ibu

400.7.14.1 Kesehatan Ibu Hamil

400.7.14.2 Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas

400.7.14.3 Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi

400.7.14.4 Keluarga Berencana

400.7.14.5 Perlindungan Kesehatan Reproduksi

400.7.15 Kesehatan Anak

400.7.15.1 Kelangsungan Hidup Bayi

400.7.15.2 Kelangsungan Anak Balita dan Prasekolah

400.7.15.3 Kewaspadaan Penanganan Balita Beresiko

400.7.15.4 Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja

400.7.15.5 Perlindungan Kesehatan Anak

400.7.16 Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer

400.7.16.1 Kesehatan Tradisional Keterampilan

400.7.16.2 Kesehatan Tradisional Ramuan

400.7.16.3 Kesehatan Alternatif dan Komplementer

400.7.16.4 Penapisan dan Kemitraan

400.7.17 Kesehatan Kerja dan Olahraga

400.7.17.1 Pelayanan Kesehatan Kerja

400.7.17.2 Kapasitas Kerja

400.7.17.3 Lingkungan Kerja

400.7.17.4 Kemitraan Kesehatan Kerja

400.7.17.5 Kesehatan Perkotaan

400.7.17.6 Kesehatan Olahraga

Df.

400.7.18 Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 400.7.18.1 Harga obat publik
- 400.7.18.2 Pengadaan Obat
- 400.7.18.3 Perbekalan Kesehatan

400.7.19 Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
- 400.7.19.1 Alat Kesehatan
- 400.7.19.2 Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat
- 400.7.19.3 Produk Diagnostik *in vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

400.7.20 Kefarmasian
- 400.7.20.1 Pelayanan Kefarmasian
- 400.7.20.2 Farmasi Klinis
- 400.7.20.3 Farmasi Komunitas
- 400.7.20.4 Penggunaan Obat Rasional

400.7.21 Produksi dan Distribusi Kefarmasian
- 400.7.21.1 Obat Tradisional
- 400.7.21.2 Kosmetik dan Makanan
- 400.7.21.3 Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus
- 400.7.21.4 Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat

400.7.22 Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perizinan
- 400.7.22.1 Surat keterangan
- 400.7.22.2 Sertifikasi dan perizinan

400.7.23 Penanggulangan Krisis Kesehatan
- 400.7.23.1 Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- 400.7.23.2 Tanggap Darurat dan Pemulihan
- 400.7.23.3 Pemantauan dan Informasi
- 400.7.23.4 Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
- 400.7.23.5 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana

400.7.24 Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
- 400.7.24.1 Tersedianya data *National Health Account* (NHA) setiap tahun
- 400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

400.7.25 Intelegensia Kesehatan
- 400.7.25.1 Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan
- 400.7.25.2 Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan

400.7.26 Kesehatan Haji

400.7.26.1 Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji
400.7.26.2 Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
400.7.27 Promosi Kesehatan
400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan
400.7.27.2 Pembinaan Advokasi dan Kemitraan Serta Pemberdayaan Peran
400.7.27.3 Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan
400.7.27.4 Hari Kesehatan
400.7.28 Data dan Informasi
400.7.28.1 Statistik Kesehatan
400.7.28.2 Analisis dan Diseminasi Informasi
400.7.28.3 Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan
400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
400.7.29.1 Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
400.7.29.2 Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
400.7.29.3 Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
400.7.29.4 Obat Asli Indonesia
400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan
400.7.30.2 Standardisasi Produk Pangan
400.7.30.3 Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan
400.7.30.4 Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
400.7.30.5 Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
400.7.31 Rekam Medis

400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN
400.8.1 Kebijakan di Bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.8.2 Fasilitasi
400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota
400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan

		400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
		400.8.2.4	Kasus Keagamaan
		400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
	400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	
		400.8.3.1	Kelembagaan dan Kepercayaan
		400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
		400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
		400.8.3.4	Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional
		400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	SOSIAL		
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak	
		400.9.2.1	Kesejahteraan Sosial Anak Balita
		400.9.2.2	Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
		400.9.2.3	Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum
		400.9.2.4	Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan
		400.9.2.5	Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial	
		400.9.3.1	Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Tubuh dan Bekas Penderita Penyakit Kronis, Netra dan Rungu Wicara, Mental
		400.9.3.2	Kelembagaan dan Advokasi Sosial
		400.9.3.3	Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
		400.9.4.1	Gelandangan, Pengemis dan Pemulung
		400.9.4.2	Tuna Susila dan Korban *Trafficking* Perempuan
		400.9.4.3	Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Meliputi Penyiapan, Reintegrasi
		400.9.4.4	Pelayanan Sosial Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/AIDS dan Kelompok Minoritas

400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

400.9.6 Pelayanan Sosial Lanjut Usia

- 400.9.6.1 Pelayanan Sosial Dalam dan Luar Panti
- 400.9.6.2 Pengembangan Kelembagaan Meliputi Pembinaan Lembaga, Kerja Sama Lembaga
- 400.9.6.3 Advokasi dan Pelayanan Sosial Kedaruratan

400.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

400.9.8 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

- 400.9.9.1 Ketahanan Sosial Masyarakat Meliputi Keserasian Sosial, Penguatan Sumber Daya
- 400.9.9.2 Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial
- 400.9.9.3 Pemulihan Sosial Meliputi Penguatan Sosial, Reintegrasi Sosial
- 400.9.9.4 Kerja Sama Meliputi Kerja Sama Pemerintah, Kerja Sama Nonpemerintah

400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

- 400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan Mitigasi
- 400.9.10.2 Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial
- 400.9.10.3 Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial
- 400.9.10.4 Kerja Sama

400.9.11 Jaminan Sosial

- 400.9.11.1 Seleksi dan Verifikasi
- 400.9.11.2 Asuransi Kesejahteraan Sosial Meliputi Kelembagaan, Pengelolaan Premi
- 400.9.11.3 Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan Meliputi Pendampingan dan Penyaluran
- 400.9.11.4 Kerja Sama

400.9.12 Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

- 400.9.12.1 Ketahanan Keluarga
- 400.9.12.2 Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
- 400.9.12.3 Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial

400.9.12.4 Kemitraan Dunia Usaha
400.9.12.5 Karang Taruna Meliputi Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas

400.9.13 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
400.9.13.1 Persiapan Pemberdayaan
400.9.13.2 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
400.9.13.3 Penggalian dan Pengembangan Potensi
400.9.13.4 Keserasian dan Penguatan Komunitas Adat Terpencil
400.9.13.5 Kerja Sama Kelembagaan

400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
400.9.14.1 Identifikasi dan Analisis
400.9.14.2 Pengembangan Kapasitas
400.9.14.3 Penataan Sosial Lingkungan Kumuh
400.9.14.4 Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas
400.9.14.5 Bantuan Langsung
400.9.14.6 Kerja Sama Kelembagaan

400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
400.9.15.1 Penghargaan dan Kesejahte-Raan Keluarga Pahlawan
400.9.15.2 Pelestarian Nilai-Nilai Kepah-Lawanan dan Keperintisan
400.9.15.3 Pengembangan Kesetiakawanan Sosial
400.9.15.4 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuang-an dan Aset Desa
400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa

400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan

400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat

400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

400.10.4.1 Budaya Nusantara

400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan

400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial

400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan

400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat

400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan

400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam

400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran

400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga

400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal

400.10.6 Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan

400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan

400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan

400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan

400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan

400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerja Sama Teknologi Perdesaan

400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

400.11.1 Kebijakan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.11.2 Pertamanan

400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan

400.11.2.2 Taman Kota

400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota

400.11.3 Pemakaman

400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman

400.11.3.2 Pemakaman

400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman

400.11.4 Jalur Hijau

400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau

400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan

400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air

400.11.5 Peran Serta Masyarakat

400.11.6 Pengawasan dan Penindakan

400.11.7 Pengelolaan Data

400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

Dt.

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

400.12.1 Kebijakan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

400.12.2 Pendaftaran Penduduk

400.12.2.1 Identitas Penduduk

400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antarnegara

400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan

400.12.2.5 *Monitoring* Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.3 Pencatatan Sipil

400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian

400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian

400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan

400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan

400.12.3.5 *Monitoring* Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.3 Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan

400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.5 *Monitoring* Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan

400.12.5.1 Kuantitas Penduduk

400.12.5.2 Kualitas Penduduk

400.12.5.3 Mobilitas Penduduk

400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk

400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, *Monitoring* dan Evaluasi

400.12.6 Penyerasian Kependudukan

400.12.6.1 Indikator Kependudukan

400.12.6.2 Proyeksi Penduduk

400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan

400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Nonpemerintah

400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA

400.13.1 Kebijakan di Bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.13.2 Analisis Pengaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

400.13.2.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data

400.13.2.2 Evaluasi dan Pelaporan

400.13.3 Fasilitas Pengaduan Kebijakan Pengendalian penduduk

400.13.3.1 Penyiapan Fasilitas

400.13.3.2 Evaluasi dan Pelaporan

400.13.4 Profil dan Proyeksi Penduduk

400.13.4.1 Data Profil dan Proyeksi Penduduk

400.13.4.2 Evaluasi Data Profil dan Proyeksi Penduduk

400.13.5 Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk

400.13.5.1 Penetapan Sasaran Parameter

400.13.5.2 Evaluasi Sasaran Parameter

400.13.6 Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk

400.13.6.1 Pemanfaatan Profil dan Proyeksi

400.13.6.2 Pemanfaatan Parameter

400.13.7 Pengembangan Sistem

400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal

400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

400.13.8 Pengembangan Materi

400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal

400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

400.13.9 *Monitoring* dan Evaluasi

400.13.9.1 *Monitoring* dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal

400.13.9.2 *Monitoring* dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

400.13.10 Analisis Sosial

400.13.11 Analisis Ekonomi

400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan

400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah

400.13.15 Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana

400.13.16 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah

400.13.16.1 Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah

400.13.16.2 *Monitoring* dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana pemerintah

400.13.17 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta

400.13.18 Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta

400.13.19 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta

400.13.19.1 Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta

400.13.19.2 *Monitoring* dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta

400.13.20 Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan

400.13.20.1 Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan

400.13.20.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan

400.13.21 Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan

400.13.21.1 Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan

400.13.21.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan

400.13.22 Kesertaan Keluarga Berencana pria

400.13.22.1 Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria

400.13.22.2 Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria

400.13.23 Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak

400.13.24 Pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS)

400.13.25 Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas

400.13.26 Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak
- 400.13.26.1 Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak
- 400.13.26.2 Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga dan Anak

400.13.27 *Monitoring* dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak
- 400.13.27.1 *Monitoring* Bina Keluarga Balita dan Anak
- 400.13.27.2 Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak

400.13.28 Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja
- 400.13.28.1 Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan
- 400.13.28.2 Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat

400.13.29 *Monitoring* dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja
- 400.13.29.1 *Monitoring* Bina Ketahanan Remaja
- 400.13.29.2 Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Remaja

400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia (Lansia) dan Rentan
- 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lanjut Usia (Lansia)
- 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan

400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32 *Monitoring* dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32.1 *Monitoring* Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32.2 Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.33 Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga

400.13.34 Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga

400.13.35 Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga

Df.

400.13.35.1 Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga
400.13.35.2 Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
400.13.36 *Monitoring* dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga
400.13.37 Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38.2 Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39 *Monitoring* dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39.1 *Monitoring* Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39.2 Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.40 Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
400.13.40.1 Perencanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
400.13.40.2 Evaluasi dan Pelaporan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
400.13.41 Advokasi dan Pencitraan
400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
400.13.42.1 Promosi
400.13.42.2 Sarana Produksi Media Komunikasi
400.13.42.3 Produk Media Komunikasi
400.13.43 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi
400.13.44 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
400.13.44.1 Pengembangan Hubungan Dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
400.13.44.2 Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
400.13.45 Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah
400.13.45.1 Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Non-Pemerintah
400.13.45.2 Penguatan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah

Df.

400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
- 400.13.46.1 Pengembangan Tenaga Lini Lapangan
- 400.13.46.2 *Monitoring* dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan

400.13.47 Institusi Masyarakat Perdesaan
- 400.13.47.1 Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan
- 400.13.47.2 *Monitoring* dan Evaluasi Institusi Masyarakat Perdesaan

400.13.48 Mekanisme Operasional Lini Lapangan
- 400.13.48.1 Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan
- 400.13.48.2 *Monitoring* dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan

400.13.49 Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan
- 400.13.49.1 Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan
- 400.13.49.2 *Monitoring* dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan

400.13.50 Pengumpulan dan Pengolahan Data

400.13.51 Analisis dan Evaluasi
- 400.13.51.1 Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk
- 400.13.51.2 Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

400.13.52 Sistem Aplikasi dan Bank Data
- 400.13.52.1 Pengembangan Sistem Aplikasi
- 400.13.52.2 Pengelolaan Bank Data

400.13.53 Infrastruktur Teknologi Informasi
- 400.13.53.1 Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi
- 400.13.53.2 Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi

400.13.54 Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi
- 400.13.54.1 Dokumentasi dan Perpustakaan
- 400.13.54.2 Pengelolaan Situs Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Media Konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

400.14.1 Keprotokolan
- 400.14.1.1 Penyelenggaraan Acara Kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)

Dt.

400.14.1.2 Buku Tamu Keprotokolan
400.14.1.3 Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah
400.14.1.4 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri

400.14.2 Daftar Nama/Alamat Kantor /Pejabat

400.14.3 Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-Peristiwa Bidang Masing-Masing, dalam Berbagai Media: Kertas, Foto/ Video/Rekaman Suara/Multimedia

400.14.4 Pengumpulan, Pengolahan Dan Penyajian Informasi Kelembagaan
400.14.4.1 Kliping Koran
400.14.4.2 Brosur/*Leaflet*/Poster/Plakat
400.14.4.3 Pengumuman/Pemberitaan

400.14.5 Hubungan Antarlembaga dan Pemerintahan Daerah
400.14.5.1 Hubungan Antarlembaga Pemerintah
400.14.5.2 Hubungan Dengan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
400.14.5.3 Hubungan dengan Perusahaan
400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, Termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
400.14.5.5 Forum Kehumasan
400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa

400.14.6 Dengar Pendapat/*Hearing* DPRD

400.14.7 Bahan/Materi Pidato/Sidang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi/Kota/Kabupaten

400.14.8 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal

400.14.9 Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik

400.14.10 Pameran/Sayembara/Lomba/Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan

400.14.11 Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan

400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Belasungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

500.1.1 Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah

500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
500.1.2.2 Akses Pangan

500.1.2.3 Kerawanan Pangan
500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
500.1.3.1 Distribusi Pangan
500.1.3.2 Harga Pangan
500.1.3.3 Cadangan Pangan
500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
500.1.4.1 Konsumsi Pangan
500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan
500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
500.1.7 Bimbingan Teknis
500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN
500.2.1 Kebijakan di Bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
500.2.2.2 Bina Usaha Jasa Perdagangan
500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
500.2.2.4 Informasi Perusahaan
500.2.2.5 Pelaku Pasar
500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
500.2.2.9 Pencitraan Produk dalam Negeri
500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
500.2.2.12 Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik
500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
500.2.2.14 Informasi Pasar
500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
500.2.2.16 Barang Strategis
500.2.2.17 Bahan Pokok Agro
500.2.3 Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
500.2.3.1 Kelembagaan dan Informasi Standar
500.2.3.2 Kerja Sama Standardisasi
500.2.3.3 Perumusan dan Penerapan Standar

500.2.3.4 Tata Usaha
500.2.3.5 Kerja Sama, Informasi, dan Publikasi
500.2.3.6 Analisa Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
500.2.3.7 Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha
500.2.3.8 Fasilitas Kelembagaan
500.2.3.9 Produk Pertambangan dan Aneka Industri
500.2.3.10 Produk Pertanian, Kimia dan Kehutanan
500.2.3.11 Jasa
500.2.3.12 Kerja Sama
500.2.3.13 Sarana dan Kerja Sama
500.2.3.14 Kelembagaan dan Penilaian
500.2.3.15 Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dan Standar Ukuran
500.2.3.16 Pengawasan
500.2.3.17 Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP

500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
500.2.4.1 Pengkajian Pasar
500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan *Audit*
500.2.4.4 Pengkajian Pasar
500.2.4.5 Pengembangan Pasar
500.2.4.6 Sistem Informasi
500.2.4.7 Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang
500.2.4.8 Pengawasan Pasar Lelang
500.2.4.9 Pengawasan Sistem Gudang

500.2.5 Bimbingan Teknis
500.2.6 Evaluasi

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

500.3.1 Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas

500.3.3 Produksi
500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan

	500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
	500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4	Pembiayaan	
	500.3.4.1	Program Pendanaan
	500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
	500.3.4.3	Urusan Permodalan
	500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
	500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
	500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)(LPDB)
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
	500.3.5.1	Perdagangan dalam Negeri
	500.3.5.2	Ekspor dan Impor
	500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
	500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
	500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
	500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran *Limited Liability Partnership* (LLP) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
	500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
	500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
	500.3.6.4	*Monitoring* dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
	500.3.6.5	Advokasi
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
	500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi
	500.3.8.2	Penelitian UKM
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antarlembaga	
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
500.3.11	*Monitoring* dan Evaluasi	

500.4 KEHUTANAN

500.4.1 Kebijakan di Bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.4.2 Penyuluhan

500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
500.4.2.2 Materi Penyuluhan
500.4.2.3 Program Penyuluhan
500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
500.4.2.8 Diseminasi
500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan

500.4.3 Planologi Kehutanan

500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
500.4.3.5 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan
500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan
500.4.3.10 Jaringan Data Spasial
500.4.3.11 Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.13 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.14 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
500.4.3.15 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

500.4.4 Bina Usaha Kehutanan

500.4.4.1 Data Areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hutan Tanaman Industri (HTI)/Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

500.4.4.2	Surat Keputusan (SK) HPH/HTI/ IUPHHK
500.4.4.3	Kerja Sama
500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
500.4.4.5	Perpanjangan
500.4.4.6	Modal dan Peralatan
500.4.4.7	Investasi Industri
500.4.4.8	Peralatan
500.4.4.9	Tenaga Kerja
500.4.4.10	Pemegang Saham
500.4.4.11	Neraca Perusahaan
500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
500.4.4.17	Produksi Kayu
500.4.4.18	Produksi Nonkayu
500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/ IUPHHK
500.4.4.20	Industri Kayu NonHPH/HTI/ IUPHHK
500.4.4.21	Industri Nonkayu
500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri *Pulp*
500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
500.4.4.25	Pemblokiran
500.4.4.26	Denda
500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/ IUPHHK
500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam

	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)/ Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ)/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	*Pass* Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang

500.4.6.4 Konvensi Keanekaragaman Hayati
500.4.6.5 Kawasan Konservasi
500.4.6.6 Pengamanan Hutan
500.4.6.7 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
500.4.6.8 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
500.4.6.9 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.4.6.10 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
500.4.6.11 Bina Cinta Alam
500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
500.4.6.13 Data Organisasi Pencinta Alam dan kader konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

500.4.7 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
500.4.7.1 Pengelolaan Benih
500.4.7.2 Kebun Benih
500.4.7.3 Tegakan Benih
500.4.7.4 Pengadaan Benih
500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih
500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.7 Pembibitan
500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.9 Pengembangan Usaha Perbenihan
500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih
500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
500.4.7.12 Tanaman Reboisasi
500.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
500.4.7.14 Perhutanan Sosial
500.4.7.15 Pengendalian Perladangan

500.4.8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.2 *Monitoring* dan Evaluasi Penelitian
500.4.8.3 Diseminasi
500.4.8.4 Gelar Teknologi
500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
500.5.1 Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.5.2 Perikanan Tangkap

	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembagaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.3	Perikanan Budidaya	
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan Ikan Air Tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya

Df.

	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenaga-kerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	500.5.4.1	Standardisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
	500.5.4.6	Standardisasi Pengembangan Produk Nonkonsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Nonkonsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan

	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perair-an dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Nonhayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan

500.5.6.18 Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
500.5.6.19 Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan
500.5.6.20 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran

500.5.7 Karantina Ikan
500.5.7.1 Pemeriksaan Ikan
500.5.7.2 Penahanan
500.5.7.3 Pengasingan
500.5.7.4 Pengamatan
500.5.7.5 Pengakuan
500.5.7.6 Penolakan
500.5.7.7 Pemusnahan
500.5.7.8 Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan
500.5.7.9 Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran
500.5.7.10 Permohonan Sertifikat
500.5.7.11 Pemasukan Formulir
500.5.7.12 Pemasukan Sertifikat
500.5.7.13 Evaluasi dan *Monitoring* Sertifikat
500.5.7.14 Surat Perintah
500.5.7.15 Rekomendasi
500.5.7.16 Penutupan Suatu Area
500.5.7.17 Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
500.5.7.18 Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
500.5.7.19 Pengawasan Pelaksanaan Operasional
500.5.7.20 Instalasi Karantina Sementara
500.5.7.21 Lokasi Karantina

500.6 PERTANIAN
500.6.1 Kebijakan di Bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.6.2 Perlindungan Hortikultura
500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah
500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura
500.6.2.4 Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis
500.6.3 Perbenihan Hortikultura
500.6.3.1 Penilaian Varietas
500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih
500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura
500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Df.

	500.6.4.1	Basis Data Lahan
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan Agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestisida	
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu

	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12	Tanaman Pangan	
	500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia Lain
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian	
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Hortikurtura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15	Mutu dan Standardisasi	
	500.6.15.1	Standardisasi
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4	Kerja Sama dan Harmonisasi
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
	500.6.16.2	Investasi
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17	Pemasaran Domestik	
	500.6.17.1	Informasi Pasar
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, *Term of Reference* (TOR)/Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat Menyurat	
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20	Diseminasi	
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian	
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, *Demontration Plot*

Δ7.

(Demplot), Seminar Lokakarya, Temu Karya, *Workshop*

500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi Lainnya

500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan

500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan

500.6.25 Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan

500.6.26 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

500.6.26.1 Hak Cipta

500.6.26.2 Hak Paten Sederhana

500.6.26.3 Hak Paten Biasa

500.6.26.4 Hak Merek

500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman

500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan

500.6.26.7 Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ditolak

500.6.27 Pelayanan Perizinan Pertanian

500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)

500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)

500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)

500.6.28 Pelayanan Hukum

500.6.28.1 Sertifikasi

500.6.28.2 Pertimbangan Hukum

500.6.29 Karantina Pertanian

500.6.29.1 Karantina Tumbuhan

500.6.29.2 Karantina Hewan

500.6.30 Bimbingan Teknis

500.6.31 Evaluasi

500.7 PETERNAKAN

500.7.1 Kebijakan di Bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan

500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara Lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Nonruminansia,

Df.

Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran

500.7.2.2 Pakan Ternak

500.7.2.3 Budidaya Ternak

500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara Lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan

500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara Lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan *Sanitary* dan Keamanan Produk Hewan, *Zoonosis* dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran

500.7.3 Bimbingan Teknis

500.7.4 Evaluasi

500.8 PERKEBUNAN

500.8.1 Kebijakan di Bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.8.2 Tanaman Semusim

500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim

500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim

500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim

500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim

500.8.3 Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar

Df.

500.8.4 Tanaman Tahunan
- 500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
- 500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan
- 500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan
- 500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan

500.8.5 Perlindungan Perkebunan
- 500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
- 500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
- 500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
- 500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
- 500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
- 500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan
- 500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
- 500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik

500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan

500.8.8 Evaluasi Perkebunan

500.9 PERINDUSTRIAN

500.9.1 Kebijakan di Bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
- 500.9.2.1 Industri Manufaktur
- 500.9.2.2 Industri Agro
- 500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- 500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.3 Promosi Industri
- 500.9.3.1 Industri Manufaktur
- 500.9.3.2 Promosi Industri Agro
- 500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- 500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.4 Standardisasi dan Teknologi
- 500.9.4.1 Industri Manufaktur
- 500.9.4.2 Industri Agro
- 500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.5 Hak dan Kekayaan Intelektual

500.9.5.1 Industri Manufaktur

500.9.5.2 Industri Agro

500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.6 Industri Hijau

500.9.6.1 Industri Manufaktur

500.9.6.2 Industri Agro

500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota

500.9.8 *Monitoring* dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri

500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri

500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional

500.9.12 Standardisasi

500.9.12.1 Standar

500.9.12.2 Penyiapan Penerapan

500.9.12.3 Infrastruktur Standar

500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri

500.9.13.1 Kebijakan Industri

500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif

500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial

500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

500.9.14.1 Industri Hijau

500.9.14.2 Lingkungan Hidup

500.9.14.3 Energi

500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri

500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri

500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual

500.9.16 *Monitoring* dan Evaluasi Kompetensi Industri

500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

500.10.1 Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.10.2 Rekomendasi Kegeologian

500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi,Tsunami, dan Gerakan Tanah

500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

Dt.

500.10.2.3 Pertambangan
500.10.2.4 Panas Bumi
500.10.2.5 Geosains
500.10.2.6 Pengukuran *Time Domain Electromagnetic* (TDEM)
500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan

500.10.3 Penelitian Kegeologian
500.10.3.1 Administrasi Pelaksanaan Penelitian
500.10.3.2 Administrasi Tenaga Penelitian
500.10.3.3 Administrasi Penggunaan Peralatan Penelitian
500.10.3.4 *Log-book* Peralatan Survei/ Peralatan Uji/Kalibrasi
500.10.3.5 Hasil Penelitian dan Penyelidikan Kegeologian
500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
500.10.3.9 Survei Geologi

500.10.4 Inventarisasi dan Evaluasi Kegeologian
500.10.4.1 Sumber Daya Geologi
500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.4.4 Survei Geologi
500.10.4.5 Konservasi

500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
500.10.5.1 Peta Potensi dan Sebaran
500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta Kebakaran Batubara
500.10.5.4 Survei Geologi

500.10.6 Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
500.10.6.1 Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi
500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah
500.10.6.4 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
500.10.6.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP

500.10.6.6 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

500.10.6.7 Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri

500.10.6.8 Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.7 Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

500.10.7.1 Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Nonkonvensional)

500.10.7.2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: pemanfaatan data migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, izin pengiriman data ke luar negeri, unitisasi lapangan minyak dan gas bumi, rekomendasi pengalihan *interest*, rekomendasi penyisihan wilayah kerja minyak dan gas bumi, penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per Semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)

500.10.7.3 Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, *reprocessing*), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)

500.10.7.4 Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi, *Plan of Development* (POD)

	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak, Kontrak Kerja Sama (KKS)
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
	500.10.7.7	Partisipasi *Interest*
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.8.1	Perumusan Pedoman, Prosedur, Layanan serta Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/ Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), antara lain: Berkas Permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
	500.10.9.3	Buku Register *Welding Procedure Specification* (WPS)/*Procedure Qualification Record* (PQR)
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan

Dr.

		Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan Persetujuan Penunjukkan Calon Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/Pengesahan Penunjukan Kepala/ Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.10	Usaha Penunjang
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi

	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT)
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	*Road Map* di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan Penggunaan Gudang Bahan Peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan Sertifikasi *Welding Procedure Specification* (WPS) dan *Procedure Qualification Record* (PQR) dan kualifikasi Juru Las *Qualification Record* (PQR) dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan Kapasitas Usaha Panas Bumi
	500.10.12.12	Penetapan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Objek Vital Nasional (Obvitnas) Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	*Monitoring* Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi

	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati BBN
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor-Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	*Database* Pengusahaaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan usaha Sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	*Audit* Energi melalui Program Kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	*Monitoring* Implementasi Hasil *Audit* Energi melalui Program Kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 *Tonne of Oil Equivalent* (TOE)
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi

Dy.

500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
500.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi
500.10.15.9 *Invesment Grade Audit* (IGA)
500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)

500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja

500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik
500.10.17.1 Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, antara lain: dokumen *grant*/hibah/*loan agreement* luar negeri, *Monitoring loan* pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan Penanganan Permasalahan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Kegiatan Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik
500.10.17.2 Pengembangan Listrik Perdesaan, antara lain: Data Program Listrik Perdesaan, Data Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), *Monitoring* dan Evaluasi Listrik Perdesaan, Listrik untuk Masyarakat Tidak Mampu
500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan

500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistrikan
500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, antara lain: Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IO, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPL-S), dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga

Df.

		Listrik (IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data Laporan Berkala Pemegang Izin
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
	500.10.18.3	Hubungan Komersial Tenaga Listrik
	500.10.18.4	Perlindungan Konsumen Listrik, antara lain: penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi Realisasi Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi Pemberian Kompensasi Pinalti Tingkat Mutu Pelayanan PT. PLN (Persero)
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.19.4	Perlindungan Lingkungan ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Forum Keselamatan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Ketenagalistrikan, Laporan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan, Dokumen Perhitungan Faktor Emisi *Clean Development Mechanism* (CDM)
500.10.20	Sertifikasi	
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

500.10.20.2 Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
500.10.20.3 Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi

500.10.21 Akreditasi Ketenagalistrikan
500.10.22 Standardisasi Kompetensi
500.10.23 Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.1 Perumusan Rancangan SNI Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.2 Forum Konsensus Rancangan SNI Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.3 Program Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan
500.10.23.4 Dokumen Pengawasan Penerapan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan
500.10.24 Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
500.10.24.1 Klasifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
500.10.24.2 Kualifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
500.10.24.3 Dokumen penunjukan Lembaga Inspeksi Teknis (LIT)
500.10.24.4 Laporan Berkala Pemegang Penunjukan LIT
500.10.24.5 Laporan Hasil Pengawasan Penunjukkan
500.10.25 Bina Program Mineral dan Batubara
500.10.25.1 Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
500.10.25.2 Rencana Induk Mineral dan Batubara
500.10.25.3 Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
500.10.25.4 Data dan Informasi Mineral dan Batubara
500.10.25.5 Pelaporan Program Mineral dan Batubara
500.10.25.6 Perencanaan Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui Lelang Reguler
500.10.25.7 Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara

Df.

500.10.25.8 Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
500.10.25.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara

500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral
500.10.26.1 Ketenagakerjaan
500.10.26.2 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang
500.10.26.3 Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.4 Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.5 Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Mineral
500.10.26.6 Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral (Logam, Bukan Logam Batuan, Radioaktif, dan Mineral Jarang)
500.10.26.7 Perizinan Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.8 Kontrak Karya (KK)
500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
500.10.26.11 Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris, pada Perusahaan Mineral
500.10.26.12 Teguran Kepada Pengusaha Kontrak Karya (KK)
500.10.26.13 Tanggapan kepada Pemerintah Daerah Terkait Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.14 Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Awal Sampul dengan Rancangan Akhir
500.10.26.15 Pelaporan Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.16 Penghargaan Usaha Pertambangan Mineral
500.10.26.17 Penerbitan Sertifikat *Clear And Clean* (Cnc) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral

500.10.27 Pembinaan Pengusahaan Batubara
500.10.27.1 Ketenagakerjaan
500.10.27.2 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang
500.10.27.3 Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Batubara
500.10.27.4 Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara

500.10.27.5 Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Batubara

500.10.27.6 Pengawasan Produksi dan Pemasaran Batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, PKP2B), Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara

500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara

500.10.27.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal *(Masterlist)*

500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)

500.10.27.11 Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris, Pada Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

500.10.27.12 Teguran kepada Pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

500.10.27.13 Tanggapan kepada Pemerintah Daerah Terkait Usaha Pertambangan Batubara

500.10.27.14 Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Awal Sampul dengan Rancangan Akhir

500.10.27.15 Pelaporan Usaha Pertambangan batubara

500.10.27.16 Penghargaan usaha pertambangan Batubara

500.10.27.17 Penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara

500.10.28 Penerimaan Negara

500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Df.

	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
	500.10.29.1	Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) / Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI), antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/ Wakil Kepala Teknik Tambang
	500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/ Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	500.10.29.5	Pemeriksaan Teknis Dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang, antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
	500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
	500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
	500.10.29.8	Rekomendasi Bahan Kimia
	500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca-tambang
	500.10.29.10	Laporan Berkala Teknik dan Lingkungan Pertambang-an/Laporan Tahunan, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) Pelaksanaan Reklamasi
	500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, antara lain: Pemberian

		Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
	500.10.29.12	Pengawasan Lingkungan Pertambangan
	500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
	500.10.29.14	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Mineral dan Batubara
	500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
	500.10.29.16	Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
	500.10.29.17	Pengawasan Teknis
	500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
	500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan	
	500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
	500.10.30.2	Pengembangan dan Inovasi
	500.10.30.3	Dokumen Penerapan/ Pemanfaatan/Pendayagunaan/ Replikasi/*Prototipe* Hasil Penelitian/Pengkajian/ Pengembangan/Inovasi
	500.10.30.4	Advokasi dan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
	500.10.30.5	Diseminasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.10.30.6	Pembinaan Penelitian/ Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan

		Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.10.30.8	Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.10.30.9	*Master Proceeding*/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.10.30.10	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
	500.10.30.11	Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.10.30.12	Layanan Jasa Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
	500.10.30.13	Sertifikasi Personil Peneliti Bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	
	500.10.31.1	Administrasi Penggunaan Peralatan
	500.10.31.2	*Log-book* Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
	500.10.33.1	Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
	500.10.33.3	Penelitian Sumber Daya Energi dan Mineral Kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	*Study*
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk

Df.

500.10.34.7 Teknologi Gas

500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara

500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya

500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral

500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara

500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

500.10.36.1 Energi Baru Terbarukan

500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan

500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi

500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Konservasi Energi

500.11 PERHUBUNGAN

500.11.1 Kebijakan di Bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan

500.11.2.1 Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe Pengumpul dan Tipe Penunjang

500.11.2.2 Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, tipe B, dan Tipe C

500.11.2.3 Penetapan Lokasi Terminal Barang Utama

500.11.2.4 Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Terminal

500.11.2.5 Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota/Provinsi

500.11.2.6 Jaringan Lintas pada Jaringan Jalan Primer

500.11.2.7 Penetapan Kelas Jalan Primer

500.11.2.8 Kualifikasi Teknis Petugas Terminal

500.11.2.9 Jaringan Transportasi Jalan Sekunder

500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan

500.11.3.1 Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

500.11.3.2 Pengembangan Transportasi Jalan

500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor

500.11.4.1 Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor

	500.11.4.2	Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor
	500.11.4.3	Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor
	500.11.4.4	Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor	
	500.11.5.1	Sertifikasi Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
	500.11.5.2	Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
	500.11.5.3	Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
	500.11.5.4	Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Kendaraan Bermotor
500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
	500.11.6.1	Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional di Luar Kawasan Perkotaan
	500.11.6.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional
500.11.7	Perlengkapan Jalan	
	500.11.7.1	Pedoman Teknis Pelengkapan Jalan
	500.11.7.2	Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
	500.11.7.3	Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi Teknis Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional
500.11.8	Angkutan Penumpang	
	500.11.8.1	Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi
	500.11.8.2	Izin Trayek Angkutan Penumpang untuk Trayek Lintas Batas Negara
	500.11.8.3	Izin Trayek Antarkota Antarprovinsi
	500.11.8.4	Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Bersifat Lintas Batas Negara dan Antarkota/Provinsi

500.11.8.5 Penilaian Kinerja Perusahaan Angkutan Umum
500.11.8.6 Pemberian Subsidi Angkutan Umum
500.11.8.7 Angkutan Perintis
500.11.8.8 Penghargaan Perusahaan Angkutan Umum

500.11.9 Angkutan Barang
500.11.9.1 Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
500.11.9.2 Tarif Angkutan Barang
500.11.9.3 Izin Operasi Angkutan Barang Tertentu
500.11.9.4 Pembinaan Angkutan Barang
500.11.9.5 Izin Dispensasi Angkutan Jalan

500.11.10 *Monitoring* Operasional
500.11.10.1 Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
500.11.10.2 Pengawasan, Penertiban dan Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Operasional Kendaraan Angkutan Umum yang Menjadi Kewenangan
500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)

500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.11.11.1 Pedoman Teknis
500.11.11.2 Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.11.3 Bimbingan Teknis (Bimtek) PPNS
500.11.11.4 Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
500.11.12.1 Pendataan Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
500.11.12.2 Analisis serta Informasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.13 Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
500.11.13.1 Pengembangan dan Penetapan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Df.

(Peta Jaringan, *Blueprint* Jaringan)

500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15.1 Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.15.2 Pengawakan Dan Registrasi Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.16.1 Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.16.2 Pemberian Sertifikasi Pelabuhan Penyeberangan

500.11.16.3 Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional

500.11.16.4 Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.17 Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.18.1 Manajemen Lalu Lintas

500.11.18.2 Tata Cara Berlalu Lintas di Sungai, danau Dan Penyebe-Rangan

500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau

500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau

500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.19.1 Pengerukan Alur Pelayaran Sungai, Danau dan Kolam Pelabuhan Penyeberangan

Dy.

500.11.19.2 Penetapan Kelas Alur dan Peta Alur Pelayaran Sungai dan Danau

500.11.19.3 Perambuan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.20.1 Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.20.2 Persetujuan Operasi Kapal Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional

500.11.21 Tarif dan Keperintisan

500.11.21.1 Perhitungan Tarif, Pemantauan Tarif Angkutan dan Jasa Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.21.2 Kriteria dan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan

500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan

500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan

500.11.22.2 Transportasi Perkotaan yang Berbasis Jalan, Jalan Rel dan Perairan Daratan

500.11.22.3 Transportasi Perkotaan untuk Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi

500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan

500.11.23.1 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan

500.11.23.2 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan

500.11.23.3 Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi di Wilayah

500.11.24 Angkutan Perkotaan

500.11.24.1 Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dalam Trayek

500.11.24.2 Jaringan Trayek Perkotaan

500.11.24.3 Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi

500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan

500.11.25.1 Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Tidak Dalam Trayek

Df.

untuk Angkutan Penumpang dan/Atau Barang

500.11.25.2 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan yang Menghubungkan Antarsimpul (Bandara, Pelabuhan, Stasiun, Dan Terminal) di Kawasan Perkotaan Yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi

500.11.25.3 Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Tidak Dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi

500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan

500.11.26.1 Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berwawasan Lingkungan

500.11.26.2 Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan

500.11.26.3 *Masterplan* Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan

500.11.26.4 Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional Dalam Kawasan Kota

500.11.26.5 Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan

500.11.26.6 *Masterplan* Transportasi Perkotaan

500.11.27 *Monitoring* dan Evaluasi Manajemen Keselamatan

500.11.27.1 *Monitoring* dan Evaluasi Data Kecelakaan

500.11.27.2 Kualifikasi Unit Pengkajian

500.11.27.3 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.28 Pengembangan Keselamatan

500.11.28.1 Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.28.2 Harmonisasi Kebijakan

500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan

500.11.29.1 Promosi Keselamatan: Penyuluhan, Publikasi dan Destinasi Keselamatan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.29.2 Kemitraan Keselamatan Antarlembaga dan Masyarakat di Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum

500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum

500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum, Awak Kapal Sungai dan Danau

500.11.31 *Audit* Keselamatan

500.11.31.1 Pedoman *Audit* Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia

500.11.31.2 Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Jalan dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.31.3 *Audit* Faktor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Serta Laik Fungsi Jalan

500.11.32 Inspeksi Keselamatan

500.11.32.1 Pedoman Keselamatan

500.11.32.2 Inspeksi Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.32.3 Investigasi Kecelakaan Sungai, Danau dan Penyeberangan Serta Laik Fungsi Jalan

500.11.33 Parkir

500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir

500.11.33.2 Izin Tempat Khusus Parkir Swasta

500.11.33.3 Surat Tugas Tempat Khusus Parkir (TKP) Pemerintah

500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

500.12.1 Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.12.2 Telekomunikasi

Dy.

	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
500.12.3	Penyiaran	
	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.3.2	*Database* Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Nonpemerintah Daerah
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
500.12.5	Pengendalian Informatika	
	500.12.5.1	*Monitoring* dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	*Monitoring* dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	M*onitoring* dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6	*e- Government*	
	500.12.6.1	Tata Kelola *e-Government*
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur *e-Government*
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas *e-Government*
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	*e- Business*	
	500.12.7.1	Tata Kelola *e-Business*
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur *e-Business*
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas *e-Business*
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan *e-Busniness*
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika

	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	*Monitoring*, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media *Online*
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15	Infrastruktur Informatika	
	500.12.15.1	Jaringan
	500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
	500.12.15.3	Keamanan Informatika
500.12.16	Sistem dan Data	
	500.12.16.1	Portal dan Konten
	500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
	500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
500.12.17	Pusat Kerja Sama	
	500.12.17.1	Kerja Sama Daerah
	500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	
	500.12.18.1	Pelayanan Informasi
	500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
	500.12.18.3	Bimbingan Teknis
500.12.19	Evaluasi	

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

500.13.1 Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata

500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata

500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata

500.13.2.3 Industri Pariwisata

500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata

500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event

500.13.3 Pemasaran Pariwisata

500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata

500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri

500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri

500.13.3.4 Pencitraan Indonesia

500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

500.13.4.1 Pengembangan Industri Perfilman

500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik

500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa

500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media

500.13.5.2 Desain dan Arsitektur

500.13.5.3 Kerja Sama dan Fasilitasi

500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif

500.13.6.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK

500.14.1 Kebijakan di Bidang Statistik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi

500.14.2.1 Perencanaan

Dt.

	500.14.2.2	Persiapan, antara lain: penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, penyusunan kuesioner, penyusunan konsep dan definisi, penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, sosialisasi kegiatan kepada *stakeholder* dan sumber data (*leaflet*, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (*intern* dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (*rule* validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, perancangan tabel, pelaksanaan uji coba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan, antara lain: pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/*batching*), pemeriksaan dokumen dan pengkodean *(editing/coding*), perekaman data (entri, *scanner*), tabulasi data, pemeriksaan tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi Hasil Sensus
500.14.3	Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, antara lain: pelaksanaan *listing*, pemilihan sampel, pengumpulan data,

Df.

pemeriksaan, pengawasan lapangan, *monitoring* kualitas

500.14.3.4 Pengolahan, antara lain: pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/*batching*), pemeriksaan dokumen dan pengkodean *(editing/coding)*, perekaman data (entri, *scanner*), tabulasi data, pemeriksaan tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi

500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: pembahasan angka hasil pengolahan, penyusunan

500.14.3.6 Diseminasi Hasil Survei

500.14.4 Konsolidasi Data Statistik

500.14.4.1 Kompilasi Data

500.14.4.2 Analisis data

500.14.4.3 Penyusunan Publikasi

500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik

500.15 KETENAGAKERJAAN

500.15.1 Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja

500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah

500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta

500.15.3 Pengembangan Standardisasi Kompetensi

500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi

500.15.3.2 Pengembangan Standardisasi Kompetensi

500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan

500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan

500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian

500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja

500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan

500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan

500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan

500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerja Sama Antarlembaga

500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan

Dy.

500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
500.15.5.3 Tenaga Pelatihan
500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan

500.15.6 Bina Pemagangan
500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri
500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan

500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerja Sama Produktivitas dan Kewirausahaan
500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan

500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
500.15.8.3 Bursa Kerja
500.15.8.4 Analisis Jabatan

500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
500.15.9.1 Antarkerja
500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja

500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerja Sama antar Lembaga

500.15.11 Standardisasi Profesi
500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi

500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama
500.15.12.2 Perjanjian Kerja
500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja

500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja

500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha

500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial

500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial

500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

500.15.14.1 Pengupahan

500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Hubungan Kerja

500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial

500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja

500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat

500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja

500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak

500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan

500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak

500.15.17.3 Kerja Sama Lintas Sektoral

500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak

500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan

500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran

500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja

500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan

500.16 PENANAMAN MODAL
500.16.1 Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
500.16.4 Promosi Penanaman Modal
500.16.4.1 Pengembangan Promosi
500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
500.16.4.4 Promosi Sektoral
500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral
500.16.5.2 Kerja Sama Regional
500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal

500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal

500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi

500.16.7.2 Pelayanan Perizinan

500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perizinan

500.16.7.4 Pelayanan Nonperizinan

500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN

Pemerintah Daerah

500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan

500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah

500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan

500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian

500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah

500.17.3.1 Penatagunaan Tanah

500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik

500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah

500.17.4 Sengketa Tanah

500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa

500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI

500.18.1 Kebijakan di Bidang Transmigrasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi

500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah

500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah

500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan

500.18.2.4 Advokasi Pertanahan

500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

500.18.3.1 Penyiapan Lahan

500.18.3.2 Penyiapan Sarana

500.18.3.3 Penyiapan Prasarana

500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman

500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi

500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan

500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan

500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi

500.18.5 Partisipasi Masyarakat

500.18.5.1 Promosi dan Motivasi

500.18.5.2 Kerja Sama Kelembagaan

500.18.5.3 Kerja Sama Antardaerah

500.18.5.4 Pelayanan Investasi

500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
- 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
- 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
- 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
- 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan

500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
- 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
- 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
- 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
- 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi

500.18.8 Pengembangan Usaha
- 500.18.8.1 Kewirausahaan
- 500.18.8.2 Produksi
- 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
- 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan Permodalan

500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
- 500.18.9.1 Analisis dan Standardisasi Sarana dan Prasarana
- 500.18.9.2 Pengembangan Sarana
- 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
- 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana

500.18.10 Penyerasian Lingkungan
- 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
- 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
- 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
- 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

600.1.1 Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
- 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
- 600.1.2.2 Kelembagaan
- 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air

Df.

	600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
	600.1.3.2	Manajemen Mutu
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air	
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)	
	600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Akibat Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8	Pembangunan Jalan	
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi

600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan *Drainage*
600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng

600.1.9 Preservasi Jalan
600.1.9.1 Standar dan Pedoman
600.1.9.2 Perencanaan Teknis
600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi
600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan

600.1.10 Pengelolaan Jembatan
600.1.10.1 Standar dan Pedoman
600.1.10.2 Perencanaan Teknis
600.1.10.3 Teknik Jembatan
600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus

600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah
600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
600.1.11.3 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan

600.1.12 Pengaturan Jalan Tol
600.1.12.1 Persiapan Pengusahaan Jalan Tol
600.1.12.2 Pengadaan Investasi Jalan Tol
600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol
600.1.12.4 Pengambilalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol

600.1.13 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan

600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman
600.1.14.1 Perencanaan Teknis
600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan
600.1.14.3 Kawasan Permukiman Perdesaan
600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus
600.1.14.5 Kelembagaan

600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan
600.1.15.1 Perencanaan Teknis
600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung
600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara
600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
600.1.15.5 Kelembagaan

600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
600.1.16.1 Perencanaan Teknis

600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan
600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
600.1.16.5 Kelembagaan
600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
600.1.17.1 Perencanaan Teknis
600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
600.1.17.5 Kelembagaan
600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi

600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

600.2.1 Kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
600.2.2.3 Kemitraan

600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan

600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
600.2.5.2 Analisa Teknik

	600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun	
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik
	600.2.6.2	Penyediaan
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
	600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus	
	600.2.7.1	Perencanaan Teknis
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3	Bimbingan Teknis dan Supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas B*acklog* Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9	Investasi Infrastruktur	
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi

Dd.

600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas
600.2.13 Peningkatan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.13.1 Peningkatan Kerja Sama
600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerja Sama Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.2 Pengembangan Materi
600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.16.1 Antarsektor
600.2.16.2 Antarwilayah
600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi

600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)
600.3.1 Kebijakan di Bidang Tata Ruang yang Dilakukan Pemerintahan Daerah
600.3.2 Perencanaan
600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota
600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota

600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
600.3.3.2 Izin Pemanfaatan Ruang
600.3.3.3 Peembatalan Izin Pemanfaatan Ruang

600.3.4 Pemetaan
600.3.4.1 Peta Dasar
600.3.4.2 *Survey* Pemetaan Ruang Darat
600.3.4.3 *Survey* Pemetaan Ruang Air
600.3.4.4 *Survey* Pemetaan Ruang Udara

600.4 LINGKUNGAN HIDUP

600.4.1 Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup

600.4.4 Ekonomi Lingkungan

600.4.5 Dampak Lingkungan
600.4.5.1 Bimbingan Teknis (Bimtek) Dampak Lingkungan
600.4.5.2 Penerapan Sistem Kebijakan Dampak Lingkungan
600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut

600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan
600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas

D4.

	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	
	600.4.8.1	Pengembangan
	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian Kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer	
	600.4.10.1	Perangkat Mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim, pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.13.1	Pengumpulan dan Pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan *Dumping*
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas

600.4.14 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
- 600.4.14.1 Pemantauan
- 600.4.14.2 Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi

600.4.15 Pengelolaan Sampah
- 600.4.15.1 Pembatasan Sampah
- 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
- 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
- 600.4.15.4 Penetapan Pemenang Adipura

600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan
- 600.4.16.1 Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan
- 600.4.16.2 Penataan Hukum Administrasi Lingkungan

600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- 600.4.17.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
- 600.4.17.2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

600.4.18 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
- 600.4.18.1 Penyidikan
- 600.4.18.2 Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
- 600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS

600.4.19 Komunikasi Lingkungan
- 600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
- 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye

600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
- 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
- 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan

600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
- 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
- 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan

600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
- 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
- 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha

600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan
- 600.4.23.1 Pengelolaan Data
- 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
- 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
- 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan

600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
- 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
- 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal

Df.

600.4.25 Standardisasi dan Teknologi
- 600.4.25.1 Standardisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan
- 600.4.25.2 Standardisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
- 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan

600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
- 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
- 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

700.1.1 Rencana Pengawasan
- 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
- 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
- 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
- 700.1.1.5 Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Tingkat Daerah

700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
- 700.1.2.1 Laporan Hasil *Audit* (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan *Auditor* Independen (LAI) yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL)
- 700.1.2.2 Laporan Hasil *Audit* Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut
- 700.1.2.3 Laporan Hasil *Audit* Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tidak Memerlukan Tindak Lanjut
- 700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
- 700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan

700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara

700.1.2.7 Laporan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi

700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan *Review*

700.1.2.9 *Good Corporate Governance* (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara antara lain: bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, pengolahan data kebutuhan

800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi antara lain: pertimbangan teknis penetapan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas

800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

800.1.1.4 Standardisasi Jabatan antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan

800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai

800.1.2.1 Formasi ASN antara lain: usulan formasi, usulan permintaan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), persetujuan formasi, penetapan formasi, penetapan formasi khusus

800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN antara lain: proses rekrutmen ASN, penetapan pengumuman kelulusan ASN

800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN

	800.1.2.4	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN
	800.1.2.6	*Open Biding* (Seleksi Terbuka Jabatan)
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antarperwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/ Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/Izin Belajar/Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Kursus/Magang/Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi Lain/ Pertukaran antarASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja

	800.1.5.2	Pengelolaan *Database* dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya
800.1.7	Bantuan Hukum	
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan PascaDiklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai	

	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Kartu Pegawai (Karpeg)/Kartu Pegawai Elektronik (KPE)/Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu)
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi Perseorangan	
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah
	800.1.13.5	ASN Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional
800.1.14	Penilaian Kompetensi	
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi

Dd.

800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

800.2.1 Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan

800.2.2.1 Sistem Informasi Program dan Pembinaan Diklat

800.2.2.2 Pedoman-Pedoman Kediklatan

800.2.2.3 Kurikulum-Kurikulum Diklat

800.2.2.4 Modul-Modul Diklat

800.2.2.5 Panduan Fasilitator

800.2.2.6 Saran/Rekomendasi Penyelenggaraan Diklat

800.2.2.7 Notulen Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat

800.2.2.8 *Monitoring* dan Evaluasi Program dan pembinaan Diklat

800.2.2.9 Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat

800.2.3 Widyaiswara

800.2.3.1 Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara

800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara

800.2.3.3 *Monitoring* dan Evaluasi Widyaiswara

800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara

800.2.3.5 Konsultasi, Advokasi dan Asistensi Widyaiswara

800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara

800.2.4 Penyelenggaraan Diklat

800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan penyelenggaraan Diklat

800.2.4.2 Penyelenggaraan Diklat

800.2.4.3 Konsultasi, Advokasi, Asistensi Penyelenggaraan Diklat

800.2.4.4 Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran

800.2.4.5 Sistem Informasi Diklat

800.2.4.6 *Monitoring* Penyelenggara Diklat

800.2.4.7 *Monitoring* dan Evaluasi Pascadiklat

800.2.5 Alumni

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)

	900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
	900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
	900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
	900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
900.1.2	Penyusunan Anggaran	
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)): Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS)
	900.1.3.2	Pendapatan
	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri *(Blue Book)*

900.1.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai *(Green Book)*

900.1.4.3 Dokumen *Memorandum of Understanding* (MOU), dan Dokumen Sejenisnya

900.1.4.4 Dokumen *Loan Agremeent,* Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) antara lain: Draft *Agreement, Legal Opinion,* Surat Menyurat dengan *Lender*

900.1.4.5 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana

900.1.4.6 Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN) Berikut Lampirannya

900.1.4.7 Dokumen Otorisasi Penarikan *Dana (Payment Advice)*

900.1.4.8 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya

900.1.4.9 *Replenishment* (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: *No Objection Letter* (NOL), *Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization* (WA)

900.1.4.10 *Staff Appraisal Report*

900.1.4.11 *Report* /Laporan

900.1.4.12 Laporan Hutang Daerah

900.1.4.13 *Completion Report/Annual Report*

900.1.4.14 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri

900.1.5 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

900.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

900.1.6.1 *Manual* Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

900.1.6.2 Dokumen Kebijakan Akuntansi

900.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi

900.1.6.4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran

900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan

900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk *Specimen* Tanda Tangan

900.1.7.2 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil, Penagihan/*Invoice*, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: *Copy* Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/*Service Report* dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

900.1.7.3 Buku Rekening Bank

900.1.7.4 Keputusan Pembukuan Rekening

900.1.7.5 Pembukuan Anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, *Register* dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran

900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan

900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

900.1.9 Penyusunan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Biaya Bantuan Pemilihan Umum (Pemilu) dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan

Df.

Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panwasda Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panitia Pengawas (Panwas), Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu

900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu

900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu

900.1.10.3 Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/ jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank

900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/ Pergeseran/Revisinya

900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah

900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

		Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah	
	900.1.12.1	Anggaran Daerah
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga nonkeuangan, penyiapan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi badan usaha milik daerah
	900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan

D1.

monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, penyiapan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah

900.1.13.5 Pinjam dan Obligasi Daerah antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, penyiapan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah

900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan

900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum antara lain: koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, penyiapan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi dana alokasi umum

900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus antara lain: koordinasi penyiapan data dasar, sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan *moni-toring*, evaluasi dana alokasi khusus

900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam antara

Df.

lain: koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, penyiapan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam

900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya antara lain: sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya

900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan

900.1.15 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

900.1.15.1 Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban keuangan daerah

Df.

900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban keuangan daerah
900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Kepala Bagian Hukum	

900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggung, jawaban keuangan daerah
900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR